

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kebutuhan manusia yang meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan zaman, perekonomian terus mengalami pertumbuhan dan perubahan, UMKM merupakan sarana dan prasarana yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian negara. Karena kemampuan mereka untuk menyerap banyak tenaga kerja, UMKM menjadi pilar kehidupan dan perekonomian negara. Melalui kegiatan bisnis yang dijalankan masyarakat, UMKM telah membuka banyak lapangan pekerjaan baru dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terus mengasah kemampuan mereka. Potensi diri maupun potensi alam dapat dioptimalkan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal. Meskipun keberadaan UMKM masih sering dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan perusahaan besar, kontribusinya terhadap perekonomian tidak bisa diabaikan. UMKM secara tidak langsung telah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran, serta menurunkan tingkat kemiskinan.

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah menetapkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, dan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh individu atau badan usaha perorangan yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki. Usaha menengah, di sisi lain, didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha secara mandiri. Usaha menengah tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar, tetapi juga tidak termasuk cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.

Pembangunan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh peran UMKM. Hasil survei OJK menunjukkan bahwa UMKM mampu menyerap 97% tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 60% pada PDB Indonesia. Dalam hal ini, UMKM diyakini dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, sektor UMKM yang dianggap penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional seharusnya dikuatkan dengan kapasitasnya. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan keterampilan

manajemen keuangan mereka dan dengan memperluas peluang UMKM untuk memperoleh pembiayaan (Yuningsih et al., 2022).

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam perekonomian suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mengakibatkan suatu negara atau daerah dapat melaksanakan kegiatan pembangunan yang lebih luas dan merata serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Dalam mencapai tujuan tersebut, kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat diperlukan, terlebih lagi di Indonesia sejak adanya undang-undang mengenai otonomi daerah, peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki daerah sangat penting. Dengan demikian, mengetahui sektor unggulan serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah menjadi hal mutlak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

Salah satu wilayah di Indonesia yang menjaga dan memberikan kontribusi UMKM yang baik adalah Kota Cilegon, di Tahun 2023 Pemerintah Kota Cilegon menggelontorkan anggaran sekitar Rp965 juta untuk pinjaman modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Cilegon. Bantuan modal tersebut, terdiri dari Rp506 juta untuk

perintisan usaha dan Rp458 juta untuk penguatan usaha. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Cilegon mengatakan, program bantuan modal UMKM, merupakan program Pemerintah Kota Cilegon di bawah kepemimpinan Walikota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2023. Sehingga pinjaman modal UMKM atau dana bergulir untuk perintisan masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp1 juta hingga Rp3 juta. Sedangkan, untuk penguatan, sebesar Rp3 juta sampai Rp5 juta. Dan pinjaman modal ini bisa dilakukan untuk membeli peralatan produksi ataupun bahan baku produksi UMKM. Meskipun pinjaman modal ini tanpa bunga dan tanpa jaminan. Namun dalam proses pencairannya harus dilakukan verifikasi dan survei lapangan. Sejak Walikota Cilegon menjabat tahun 2021 hingga sekarang sudah ada 1.616 pelaku usaha di Cilegon telah menerima pinjaman modal dari program dana bergulir tersebut (Rohmanudin, 2023).

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Al-Shaikh (1998), penyebab utama kegagalan yang dialami oleh pelaku UMKM yaitu kualitas pencatatan yang buruk, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan pajak yang tinggi sebanyak 24,5%, perencanaan yang buruk sebanyak 20,5%, kurangnya pendanaan sebanyak 16%, manajemen yang buruk

sebanyak 13,5% dan pengalaman manajemen yang buruk sebanyak 8% (Ingkiriwang et al., 2025).

Tabel 1.1
Penyebab Kegagalan UMKM

No	Penyebab	Persen %
1	Kualitas pencatatan yang buruk, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan pajak yang tinggi	24,5%
2	Perencanaan yang buruk	20,5%
3	Kurangnya pendanaan	16%
4	Manajemen yang buruk	13,5%
5	Pengalaman manajemen yang buruk	8%

Berdasarkan tabel diatas permasalahan yang seringkali terjadi di pelaku UMKM yang juga merupakan tantangan yang dihadapi UMKM dalam keberlangsungan usahanya yaitu dalam hal pendanaan atau permodalan (Ingkiriwang et al., 2025). Salah satu tantangan utama UMKM yaitu keterbatasan ketersediaan lembaga keuangan formal yang melayani kebutuhan spesifik UMKM. Dalam hal ini banyak bank atau lembaga keuangan yang lebih memilih memberikan pinjaman pendanaan pada pelaku bisnis yang sudah besar dan mengesampingkan UMKM dengan memberikan opsi terbatas yang membuat UMKM kesulitan mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan bisnis mereka. Terbatasnya pendanaan membuat pelaku UMKM terutama di kota kota

kecil hanya mengandalkan sumber keuangan informal, seperti meminjam kepada keluarga, teman atau kenalannya untuk membiayai bisnis mereka. Tetapi seringkali sumber-sumber tersebut tidak dapat menyediakan pendanaan yang cukup dan terbatas yang membuat terhambatnya pertumbuhan UMKM. Kurangnya akses ke layanan keuangan ini juga membuat pelaku UMKM terbatas kemampuannya untuk mengadopsi teknologi baru dan bersaing di pasar dengan efektif. Tantangan ini yang membuat UMKM menghadapi keterlambatan dalam perkembangan usahanya. Selain terbatasnya pendanaan dari lembaga keuangan formal, UMKM juga menghadapi suku bunga yang tinggi dan persyaratan pinjaman yang ketat, hal ini membuat pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari sumber-sumber tradisional. Tantangan lainnya yang dihadapi UMKM menurut Prakoso (2020), yaitu kurangnya literasi keuangan dan keterampilan manajemen bisnis (Ningsih et al., 2023).

Ada berbagai cara atau strategi yang dapat digunakan oleh suatu usaha untuk mempertahankan usahanya ditengah persaingan bisnis yang semakin ketat ini. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu kinerja keuangan suatu usaha yang baik. Sebuah usaha sudah pastinya tidak akan terlepas dari kinerja keuangan. Dengan kinerja keuangan ini juga dapat dilihat sejauh mana suatu usaha telah melakukan usahanya dengan

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan juga benar. Jika sebuah usaha memiliki kinerja keuangan yang baik, maka keputusan usaha yang akan diambil pastinya akan mengambil keputusan yang lebih baik pula. Keputusan usaha yang diambil ini yang nantinya akan menentukan keberlanjutan dari usaha yang sedang dijalani. Meskipun begitu, jika kinerja keuangan tidak baik maka pengambilan keputusan pun pastinya akan terhambat. Maka dari itu kinerja keuangan yang baik dapat membantu mempertahankan suatu usaha atau bisnis ditengah persaingan yang semakin ketat.

Kinerja keuangan merupakan ukuran untuk menilai sejauh mana suatu bisnis atau organisasi berhasil memperoleh keuntungan. Evaluasinya dapat dilakukan dengan metode kuantitatif maupun kualitatif. Indikator kuantitatif mencakup pengembalian aset, ekuitas, investasi, jumlah produk yang terjual, rasio biaya operasional, jumlah pelanggan, serta tingkat efisiensi. Sementara itu, indikator kualitatif meliputi pencapaian tujuan, kedisiplinan, efektivitas, penilaian pemimpin terhadap hasil organisasi, serta perilaku individu dalam organisasi (Darmawan et al., 2021).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan masyarakat agar mampu mengelola keuangan dengan baik.

Sosialisasi tentang literasi keuangan terus dilakukan agar masyarakat baik produsen atau konsumen semakin berdaya dengan adanya pengetahuan dan keterampilan literasi keuangan dan mampu untuk mengelola keuangan mereka dengan baik. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengenal lembaga dan jasa keuangan saja namun mereka mempunyai kemampuan dan kesadaran untuk usaha pembaharuan sikap mereka pada manajemen keuangan yang pada gilirannya bisa memperbaiki kondisi kesejahteraan secara mandiri.

Literasi keuangan memengaruhi pola pikir dan pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan keuangan. Bagi pemilik usaha, kemampuan mengelola keuangan sangat penting untuk menjaga kinerja dan keberlangsungan usaha. Pemahaman yang baik tentang keuangan juga mendukung peningkatan kinerja perusahaan, sehingga UMKM berpeluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang (Kasendah & Wijayangka, 2019).

Dengan perkembangan teknologi yang cepat, banyak industri berubah, termasuk sektor keuangan. Salah satu jenis pengembangan di bidang keuangan adalah munculnya teknologi keuangan (*fintech*). Teknologi *fintech* adalah teknologi yang berhubungan dengan layanan keuangan. Contoh layanan *fintech* termasuk aplikasi untuk pembayaran, alat peminjaman, dan sebagainya.

Fintech menawarkan peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan aktivitas perekonomiannya secara lebih efisien dan efektif. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memperoleh kemudahan dalam bertransaksi melalui penerapan teknologi dalam layanan keuangan ini. Namun, pertumbuhan *fintech* membuat masyarakat Indonesia yang tidak siap untuk perubahan ekonomi terganggu (Rahardjo et al., 2019).

Financial technology adalah sebuah layanan keuangan yang bergantung pada teknologi yang pasti akan membuat transaksi yang kita lakukan dimana saja dan kapan saja lebih mudah. Zopa, sebuah institusi keuangan di Inggris yang menyediakan layanan peminjaman uang, memulai model teknologi keuangan baru ini pada tahun 2004. Ini adalah salah satu contoh penggunaan teknologi informasi dalam industri keuangan. *Financial technology* memiliki banyak fungsi dan dianggap mampu berkembang dengan cepat. Saat ini, teknologi keuangan dapat menyediakan transaksi keuangan online seperti uang elektronik, akun virtual, pinjaman, crowdfunding, dan agregator. Sebagian besar *financial technology* yang telah beroperasi adalah perusahaan berbasis konvensional, tetapi banyak juga yang merupakan startup atau perusahaan rintisan (Rizal et al., 2018).

Tabel 1.2

Financial Technology Indonesia Periode Juni 2025

Uraian Description	Jumlah Penyelenggara (Unit) Number of Companies (Units)	Total Aset (miliar Rp) Total Assets (IDR billion)	Total Liabilitas (miliar Rp) Total Liabilities (IDR billion)	Total Ekuitas (miliar Rp) Total Equities (IDR billion)
1. Penyelenggara Konvensional	89	9.692	3.802	5.889
2. Penyelenggara Syariah	7	179	62	117
Total	96	9.871	3.865	6.006
Periode : Juni 2025 Period: June, 2025				

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan OJK 2025

Perkembangan *financial technology* di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Juni 2025, jumlah penyelenggara *fintech* di Indonesia tercatat sebanyak 96 perusahaan dengan total aset mencapai Rp9.871 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa *fintech* memiliki potensi besar dalam mendukung kegiatan perekonomian, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun demikian, pemanfaatan *fintech* oleh pelaku UMKM masih belum optimal. Sebagian besar UMKM belum memaksimalkan penggunaan *fintech* baik dalam transaksi digital, pengajuan pembiayaan, maupun pengelolaan keuangan usaha. Kesenjangan antara perkembangan industri *fintech* dan tingkat pemanfaatannya juga terlihat pada UMKM di

Kota Cilegon. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmiyanti et al., 2023) ditemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih belum memahami keberadaan serta manfaat *fintech* dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Selain itu, hasil penelitian (Yunita, 2023) mengenai penggunaan QRIS pada UMKM di Kota Cilegon menunjukkan bahwa 72,2% pelaku UMKM merasakan manfaat dari penggunaan sistem pembayaran digital QR-Code, sebanyak 69% di antaranya masih memiliki persepsi risiko yang tinggi dalam penggunaannya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapat dorongan baru dengan munculnya inovasi *financial technology*. Teknologi ini dapat membantu mereka mendapatkan akses lebih mudah ke produk keuangan dan memungkinkan mereka untuk memanfaatkannya sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan untuk bisnis mereka. Peran teknologi keuangan tidak hanya terbatas pada pembiayaan modal usaha, tetapi juga merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital dan pengaturan. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi di Indonesia telah menjadi penting (Sugiarti et al., 2019).

Kemajuan perusahaan sangat dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang terstruktur, terutama di tengah meningkatnya konsumsi

masyarakat seiring pertumbuhan pendapatan dan membaiknya perekonomian. Dalam bisnis, pengelolaan keuangan berperan penting untuk mengendalikan pengeluaran modal, mengatur kas operasional, meminimalkan risiko gagal bayar, serta menekan biaya agar tetap efisien. Secara umum, pengelolaan keuangan merupakan upaya individu maupun kelompok dalam mengatur dana dengan tujuan mencapai kesejahteraan finansial (Santiara & Sinarwati, 2023).

Pengelolaan keuangan yang terorganisir sangat memengaruhi kemajuan bisnis, terutama saat konsumsi masyarakat meningkat seiring pertumbuhan pendapatan dan perekonomian yang lebih baik. Pengelolaan keuangan sangat penting bagi bisnis untuk mengontrol pengeluaran modal, mengatur kas operasional, meminimalkan risiko gagal bayar, dan menekan biaya. Secara umum, pengelolaan keuangan adalah upaya individu maupun kelompok untuk mengelola keuangan mereka dengan tujuan mencapai kemakmuran.

Banyak pelaku UMKM masih mengabaikan pengelolaan keuangan karena keterbatasan pengetahuan akuntansi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 70% UMKM di Indonesia tetap terjebak dalam pola pengelolaan keuangan yang tidak terstruktur, sekitar 60% UMKM di Indonesia masih mengalami kesulitan keuangan dan lebih dari 45% UMKM di Indonesia tidak memiliki pencatatan keuangan

yang baik (Luckieta, 2025). Akibatnya, mereka kesulitan mengatur keuangan sehingga berdampak pada kinerja usaha. Sebaliknya, semakin baik pengelolaan keuangan, semakin meningkat pula kinerja UMKM. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan upaya UMKM untuk menekan penurunan pendapatan, menjaga stabilitas kinerja, serta mencegah kerugian dan kebangkrutan. Namun, banyak pelaku UMKM belum menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang tepat karena keterbatasan pengetahuan dan rendahnya literasi keuangan. Akar dari permasalahan ini yaitu ketidaktahuan pelaku UMKM dalam pengelolaan keuangan yang sehat, ketidaktahuan dalam menyiapkan laporan keuangan, dalam membedakan antara pengeluaran perusahaan dan pribadi dan ketidaktahuan dalam distribusi dana yang tepat (Trisnawati & Dewi, 2024). Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya peningkatan literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Cilegon.

Berdasarkan uraian di atas, ditemukan adanya *gap research* terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan UMKM. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menggali informasi lebih mendalam mengenai topik tersebut. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, *Financial Technology* dan Pengelolaan Keuangan**

terhadap Kinerja Keuangan UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. UMKM kerap menghadapi keterlambatan dalam pengembangan usaha karena adanya berbagai tantangan, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang belum sepenuhnya teratasi.
2. UMKM menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman literasi keuangan yang berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan.
3. Kurangnya pemanfaatan *financial technology* untuk menunjang peningkatan kinerja keuangan.
4. UMKM juga sering mengabaikan masalah pengelolaan keuangan sehingga kinerja keuangannya menjadi kurang optimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar peneliti terarah dan menghindari pembahasan yang meluas, maka dilakukanlah pembatasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon.

2. Penelitian ini hanya meneliti variabel literasi keuangan, *financial technology* dan pengelolaan keuangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon?
2. Apakah *financial technology* berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon?
3. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon?
4. Apakah literasi keuangan, *financial technology* dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *financial technology* terhadap kinerja keuangan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan, *financial technology* dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu yang diteliti, berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Sebagai sumber bacaan untuk menambah wawasan tentang literasi keuangan, *financial technology* dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM, serta dapat berguna sebagai acuan untuk penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan mampu dimanfaatkan oleh:

a. Peneliti

Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi serta memberikan kegunaan dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh literasi keuangan, *financial technology* dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM bagi penulis.

b. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana literasi keuangan, *financial technology* dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi serta acuan bagi penelitian selanjutnya.

c. Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai sumber evaluasi tentang literasi keuangan, *financial technology*, dan pengelolaan keuangan yang telah diterapkan selama ini. Pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kinerja

keuangan mereka untuk mendorong kemajuan dan perkembangan usahanya.

d. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan bidang ekonomi khususnya kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM di Kota Cilegon.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan secara terperinci dan sistematis serta berkesinambungan agar bisa dipahami dengan jelas. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Ke-Satu, Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah disertai dengan alasan mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Ke-Dua, Kajian teoritis yang berisi tentang uraian sistematis dari teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli mengenai variabel-variabel penelitian yang dibahas pada saat

penyusunan penelitian, selain itu pada kajian teori ini juga membahas tentang mengenai hubungan atau keterkaitan antara variabel penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berfikir dan juga hipotesa yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

Bab Ke-Tiga, Metode penelitian yang menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, operasional variabel penelitian dan teknik analisis data.

Bab Ke-Empat, Pembahasan hasil penelitian yang berisi uraian mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya yang analisis dan terpadu. Serta temuan-temuan tersebut disajikan secara jujur dan apa adanya sesuai dengan etika ilmiah.

Bab Ke-Lima, Kesimpulan dan saran yang berisi jawaban ringkas terhadap perumusan masalah dan saran dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian serta dapat ditujukan kepada pengambil kebijakan, pengguna hasil penelitian, ataupun kepada peneliti berikutnya.